

# AKUNTABEL

Lembaga Administrasi Negara





## Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan akuntabel secara konseptual-teoritis yang **bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;**
- Menjelaskan panduan perilaku (kode etik akuntabel);
- **Memberikan contoh perilaku** dengan pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien serta **tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan**
- **Menganalisis** kasus atau menilai contoh penerapan



## AKUNTABEL + INTEGRITAS

Kegiatan Belajar	Kompetensi yang ingin dicapai	Cakupan Bahasan
1. Potret Pelayanan Publik Negeri Ini	Kemampuan memahami kebutuhan merubah pola pikir menjadi ASN yang baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potret Layanan Publik di Indonesia</li><li>• Tantangan Layanan Publik</li><li>• Keutamaan Mental Melayani</li></ul>

## UU No.25/2009 – Layanan Publik

**Pasal 4** menyebutkan Asas Pelayanan Publik yang meliputi: **a.** kepentingan Umum, **b.** kepastian hukum, **c.** kesamaan hak, **d.** keseimbangan hak dan kewajiban, **e.** keprofesionalan, **f.** partisipatif, **g.** persamaan perlakuan/tidak diskriminatif **h.** keterbukaan, **i.** **akuntabilitas**, **j.** fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, **k.** ketepatan waktu, dan **l.** kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

# Realitas Layanan Publik Indonesia









## Mental Melayani



**Mulai dari Diri Sendiri**

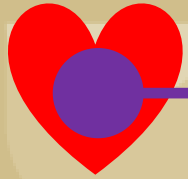


**Mulai dari yang kecil**



**Mulai dari SEKARANG!**





## AKUNTABEL + INTEGRITAS

### Latihan Soal

- Banyak perbaikan yang terjadi di layanan publik yang bisa ditemukan di keseharian Anda, pilihlah salah satu kasus yang pernah Anda alami, dan tuliskan perubahan/perbaikan yang terjadi dari kondisi sebelumnya.
- Masih ada beberapa layanan publik yang belum berubah dari versi buruknya, pilihlah salah satu layanan yang Anda ketahui masih belum berubah tersebut, dan tuliskan harapan perubahan yang Anda inginkan.
- Lihatlah video unik pada tautan ini yang berakting terkait sebuah layanan yang sudah berubah dari bentuk sebelumnya:  
[https://www.instagram.com/reel/CX3Oa0rJoQ7/?utm\\_medium=share\\_sheet](https://www.instagram.com/reel/CX3Oa0rJoQ7/?utm_medium=share_sheet) dan tuliskan pendapat Anda.



# AKUNTABEL + INTEGRITAS

Kegiatan Belajar	Kompetensi yang ingin dicapai	Cakupan Bahasan
2. Konsep Akuntabilitas	Kemampuan memahami akuntabilitas dari sisi konseptual- teoretis sebagai llandasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengertian akuntabilitas</li><li>• Aspek-aspek akuntabilitas</li><li>• Pentingnya akuntabilitas</li><li>• Tingkatan akuntabilitas</li></ul>



## Pengertian Akuntabilitas

Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik (Matsiliza dan Zonke, 2017)



## Aspek-Aspek Akuntabilitas

- **Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)**  
Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat.
- **Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-oriented)**  
Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif.
- **Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting)**  
Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas.
- **Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting)**  
Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas.
- **Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)**  
Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



## Pentingnya Akuntabilitas

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu:

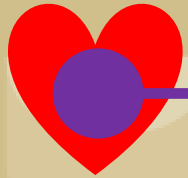
1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi);
2. untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional);
3. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).



## Tingkatan Akuntabilitas

1. Akuntabilitas Personal
2. Akuntabilitas Individu
3. Akuntabilitas Kelompok
4. Akuntabilitas Organisasi
5. Akuntabilitas Stakeholder





## AKUNTABEL + INTEGRITAS

### Latihan Soal

- Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sering kita dengan istilah kata responsibilitas dan akuntabilitas. Kedua kata tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda. Apa yang membedakan antara responsibilitas dan akuntabilitas dilihat dari pengertiannya? Dan berikan pendapat anda terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas tersebut?
- Bacalah kembali pembuka Bab II pada modul yang dikutip dari Laporan Tahun 2020 Ombudsman Republik Indonesia, menurut Anda, bagaimana kasus itu bila dilihat dari konteks Akuntabilitas?
- Dalam hal pelayanan publik, masih sering diketemukan keluhan dari masyarakat terhadap kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit-belit, maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik. Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Menurut anda, seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik jika dikaitkan dengan fenomena tersebut? Jelaskan.

# AKUNTABEL + INTEGRITAS

Kegiatan Belajar	Kompetensi yang ingin dicapai	Cakupan Bahasan
3. Panduan Perilaku Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi</li> <li>• Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</li> <li>• Kemampuan menggunakan Kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas dan Integritas</li> <li>• Integritas dan Antikorupsi</li> <li>• Mekanisme Akuntabilitas</li> <li>• <b>Konflik kepentingan</b></li> <li>• <b>Pengelolaan gratifikasi yang akuntabel</b></li> <li>• <b>Membangun pola pikir antikorupsi</b></li> <li>• <b>Apa yang diharapkan dari Seorang ASN</b></li> </ul>



## AKUNTABILITAS + INTEGRITAS

Akuntabilitas dan Integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah Administrasi sebuah negara (Matsiliza dan Zonke, 2017). Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aulich (2011) bahkan mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya Akuntabilitas, Integritas itu sendiri, dan Transparansi.





## Integritas dan Antikorupsi

Bangsa besar adalah bangsa yang meneladani integritas para tokoh bangsanya. Setidaknya, mereka membuktikan bahwa negeri ini pernah memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, sederhana, dan sangat bertanggung jawab. Mereka adalah fakta bahwa bangsa kita tidaklah memiliki budaya korupsi sejak lama. Dari mereka, kita bisa optimistis, menjadi pribadi berintegritas dan amanah bukanlah kemustahilan bagi kita. Siapakah para tokoh bangsa yang dapat kita jadikan sebagai role model berintegritas? Aktualisasi integritas apa saja yang dapat kita teladani? Simaklah hingga tuntas video-video berikut:

- **Demi Sebuah Rahasia:** <https://youtu.be/JtoFPfcv1To>
- **Bola dan Abang Becak:** <https://youtu.be/ks1LB-HE6SY>
- **Siapa yang Mengisi Bensin:** <https://youtu.be/sPblj3PDVks>
- **Surat Tilang untuk Sultan:** <https://youtu.be/iM9wo8-qV0c>



## Mekanisme Akuntabilitas

Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi:

- **Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality).**
- **Akuntabilitas proses (process accountability).**
- **Akuntabilitas program (program accountability).**
- **Akuntabilitas kebijakan (policy accountability).**

## Alat Akuntabilitas Indonesia

- Perencanaan Strategis (Strategic Plans) yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-D), Menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D), dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D), Rencana Strategis (Renstra) untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap PNS.
- Kontrak Kinerja. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS hingga Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
- Laporan Kinerja yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan.



## Menciptakan Lingkungan Akuntabel

### 1. Kepemimpinan

Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (lead by example), adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula, terhindarnya dari aspek- aspek yang dapat menggagalkan kinerja yang baik yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya, sehingga dengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi.



## Menciptakan Lingkungan Akuntabel

### 2. Transparansi

Tujuan dari adanya transparansi adalah:

- a) Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal
- b) Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan
- c) Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan
- d) Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan.



## Menciptakan Lingkungan Akuntabel

### 3. Integritas

Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan/atau stakeholders.

## Menciptakan Lingkungan Akuntabel

#### 4. Tanggung Jawab (Responsibilitas)

Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi.

##### a) Responsibilitas Perseorangan

- Adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan
- Adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan
- Adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan

##### b) Responsibilitas Institusi

- Adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya
- Adanya pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan
- Adanya penempatan PNS dan individu yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya

## Menciptakan Lingkungan Akuntabel

### 5. Keadilan

Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.

### 6. Kepercayaan

Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya.



## Menciptakan Lingkungan Akuntabel

### 7. Keseimbangan

Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian (skill) yang dimiliki.

## Menciptakan Lingkungan Akuntabel

### 8. Kejelasan

Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi.

## Menciptakan Lingkungan Akuntabel

### 9. Konsistensi

Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.

## 5 Langkah Membuat Framework Akuntabilitas





## Mengelola Konflik Kepentingan

Untuk memperkuat pemahaman Anda terkait Konflik Kepentingan, silakan pelajari materi-materi terkait pada tautan berikut:

Infografis Definisi Konflik Kepentingan:

<https://aclc.kpk.go.id/learning-materials/education/infographics/definition-about-conflict-of-interest>

Infografis Prinsip Dasar Penanganan Konflik Kepentingan:

<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/prinsip-dasar-penanganan-konflik-kepentingan>

Infografis Tahapan Dalam Penanganan Konflik Kepentingan:

<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/infografis/tahap-tahap-dalam-penanganan-konflik-kepentingan>

Infografis Faktor Yang Mendukung Keberhasilan Penanganan Konflik Kepentingan:

<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/faktor-pendukung-keberhasilan-penanganan-konflik-kepentingan>

## 2 Tipe Konflik Kepentingan

### 1. Keuangan

Penggunaan sumber daya lembaga (termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur) untuk keuntungan pribadi.

Contoh :

- Menggunakan peralatan lembaga/unit/divisi/bagian untuk memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi;
- menggunakan peralatan lembaga/unit/divisi/bagian untuk memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi;
- menerima hadiah atau pembayaran mencapai sesuatu yang diinginkan;
- menerima dana untuk penyediaan informasi pelatihan dan / atau catatan untuk suatu kepentingan;
- menerima hadiah pemasok atau materi promosi tanpa otoritas yang tepat



## 2 Tipe Konflik Kepentingan

### 2. Non-Keuangan

Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan / atau orang lain.

Contoh:

- Berpartisipasi sebagai anggota panel seleksi tanpa menggunakan koneksi, asosiasi atau keterlibatan dengan calon
- Menyediakan layanan atau sumber daya untuk klub, kelompok asosiasi atau organisasi keagamaan tanpa biaya
- Penggunaan posisi yang tidak tepat untuk memasarkan atau mempromosikan nilai-nilai atau keyakinan pribadi

## Pengelolaan Gratifikasi yang Akuntabel

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Mari kita mempelajari lebih dalam mengenai gratifikasi. Apakah perbedaannya dengan hadiah, suap-menyuap dan pemerasan? Simaklah video pada tautan berikut:





## Membangun Pola Pikir Antikorupsi

Pentingnya akuntabilitas dan integritas menurut Matsiliza (2013) adalah nilai yang wajib dimiliki oleh setiap unsur pelayan publik, dalam konteks modul ini adalah PNS. Namun, secara spesifik, Matsiliza menekankan bahwa nilai integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayan publik secara moral dalam membentengi institusi, dalam hal ini lembaga ataupun negara, dari tindakan pelanggaran etik dan koruptif yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat.

## Membangun Pola Pikir Antikorupsi

Impian kita semua untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tidak akan terwujud selama masih ada praktek-praktek korupsi di negeri ini. Ya, korupsi menggerogoti potensi yang seharusnya bisa dipergunakan untuk memakmurkan negeri ini. Koruptor yang memakan nangka, rakyat kebanyakan getahnya. Betulkah bahwa korupsi merupakan biang keladinya?



## Membangun Pola Pikir Antikorupsi

- ASN harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas- tugas resmi mereka dengan tidak memihak;
- Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat berhati-hati untuk kepentingan umum;
- ASN memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya, dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, meliputi:
  - Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan lembaga-lembaga yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional;
  - Menggunakan keuangan organisasi dengan bunga secara pribadi atau yang berurusan dengan kerabat seperti:
  - Memiliki saham atau kepentingan lain yang dimiliki oleh ASN di suatu perusahaan atau bisnis secara langsung, atau sebagai anggota dari perusahaan lain atau kemitraan, atau melalui kepercayaan;
  - memiliki pekerjaan diluar, termasuk peran sukarela, janji atau direktur, apakah dibayar atau tidak; dan
  - menerima hadiah atau manfaat.
- Jika konflik muncul, ASN dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis, untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat;
- ASN dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.



## Membangun Pola Pikir Antikorupsi



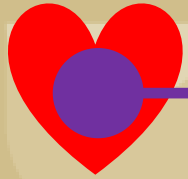
<https://www.youtube.com/watch?v=nxNynTuNMr4>



## Yang Diharapkan dari Seorang ASN?

### Perilaku Individu (Personal Behaviour)

- ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka;
- ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat;
- Kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif;
- ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan dan kesejahteraan;  
PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut;
- ASN melayani Pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan.



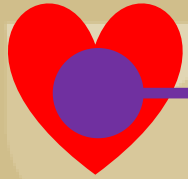
## AKUNTABEL + INTEGRITAS

### Latihan Soal

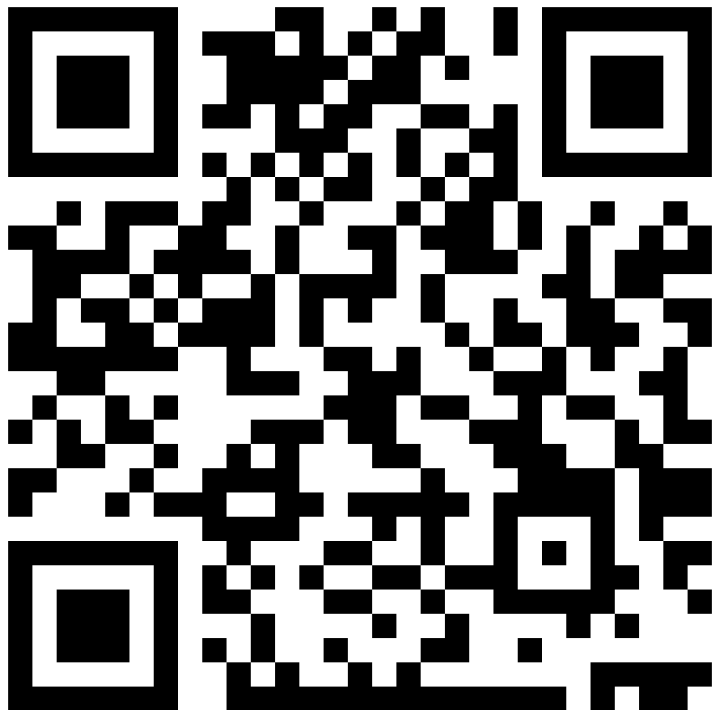
Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, serta Akuntabilitas Kebijakan. Ada Studi Kasus Seperti Berikut :

**“Pemerintah Pusat maupun daerah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik yang disebut e-procurement. Tujuannya adalah pertama, agar tidak ada main mata antara pengada proyek dan pihak yang mengadakan proyek (Meminimalisir Kasus KKN). Kedua, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan cepat dan teratur “**

Pertanyaannya, termasuk dimensi akuntabilitas apakah studi kasus tersebut? Jelaskan.



## AKUNTABEL + INTEGRITAS



Kondisi apa yang membuat cerita di video itu berpotensi menjadi kasus Tindak Pidana Korupsi?

Jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan dengan cerita di video itu?

Siapa saja pihak di dalam video itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi?

Kondisi apa yang bisa menjadikan cerita di dalam video itu menjadi sebuah kasus Tindak Pidana Korupsi?

Apa dampak yang akan terjadi ke depannya bila cerita tersebut menjadi sebuah kasus Tindak Pidana Korupsi?

Apakah menurut Anda apa yang dilakukan oleh Pejabat Lelang sudah benar? Jelaskan kenapa?

Selain Pemenang Lelang dan Pejabat Lelang, siapa lagi yang bisa berperan agak kasus itu tidak terjadi?

Bila Anda harus memilih salah satu perang dalam video itu, Apa yang akan Anda lakukan?

# AKUNTABEL + INTEGRITAS

Kegiatan Belajar	Kompetensi yang ingin dicapai	Cakupan Bahasan
4. Akuntabel dalam Konteks Organisasi Pemerintahan	<b>Pemahaman atas ranah dan kasus umum yang terkait dengan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparansi dan akses informasi</li> <li>• Praktek kecurangan dan <b>perilaku korup</b></li> <li>• Penggunaan sumber daya milik negara</li> <li>• Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah</li> <li>• <b>Membangun budaya antikorupsi di Organisasi Pemerintahan</b></li> </ul>



## Transparansi dan Akses Informasi

Seperti bunyi Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tercantum beberapa tujuan, sebagai berikut: **(1)** Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; **(2)** Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; **(3)** Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; **(4)** Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; **(5)** Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; **(6)** Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau **(7)** Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi.



## Prinsip Kerterbukaan Informasi Publik

1. Maximum Access Limited Exemption (MALE) Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut dapat merugikan kepentingan publik. Pengecualian itu juga harus bersifat terbatas, dalam arti : (i) hanya informasi tertentu yang dibatasi; dan (ii) pembatasan itu tidakberlaku permanen.



## Prinsip Kerterbukaan Informasi Publik

2. Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan. Akses terhadap informasi merupakan hak setiap orang. Konsekuensi dari rumusan ini adalah setiap orang bisa mengakses informasi tanpa harus disertai alasan untuk apa informasi tersebut diperlukan. Seorang pengacara publik tidak perlu menjelaskan secara detail untuk apa ia membutuhkan informasi tentang suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya penilaian subjektif pejabat publik ketika memutuskan permintaan informasi tersebut. Pejabat publik bisa saja khawatir informasi itu disalahgunakan. Argumentasi ini sebenarnya kurang kuat, karena penyalahgunaan informasi tetap bisa dipidanakan.

## Prinsip Kerterbukaan Informasi Publik

3. Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan Cepat Nilai dan daya guna suatu informasi sangat ditentukan oleh konteks waktu. Seorang wartawan misalnya, terikat pada deadline saat ia meminta informasi yang berkaitan dengan berita yang sedang dia tulis. Dalam kasus lain, seorang penggiat hak asasi manusia membutuhkan informasi yang cepat, murah, dan sederhana dalam aktivitasnya. Informasi bisa jadi tidak berguna jika diperoleh dalam jangka waktu yang lama, karena bisa tertutup oleh informasi yang lebih baru. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa informasi juga harus sederhana.

## Prinsip Kerterbukaan Informasi Publik

### 4. Informasi Harus Utuh dan Benar

Informasi yang diberikan kepada pemohon haruslah informasi yang utuh dan benar. Jika informasi tersebut tidak benar dan tidak utuh, dikhawatirkan menyesatkan pemohon. Dalam aktivitas pasar modal biasanya ada ketentuan yang melarang pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan (misleading information). Seorang advokat atau akuntan publik biasanya mencantumkan klausul disclaimer. Pendapat hukum dan pendapat akuntan dianggap benar berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa.

## Prinsip Kerterbukaan Informasi Publik

### 5. Informasi Proaktif

Badan publik dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi tertentu yang penting diketahui publik. Misalnya, informasi tentang bahaya atau bencana alam wajib disampaikan secara proaktif oleh Badan Publik tanpa perlu ditanyakan oleh masyarakat.

### 6. Perlindungan Pejabat yang Beritikad Baik

Perlu ada jaminan dalam undang-undang bahwa pejabat yang beritikad baik harus dilindungi. Pejabat publik yang memberikan informasi kepada masyarakat harus dilindungi jika pemberian informasi dilandasi itikad baik. Misalnya, pejabat yang memberikan bocoran dan dokumen tentang praktik korupsi di instansinya.

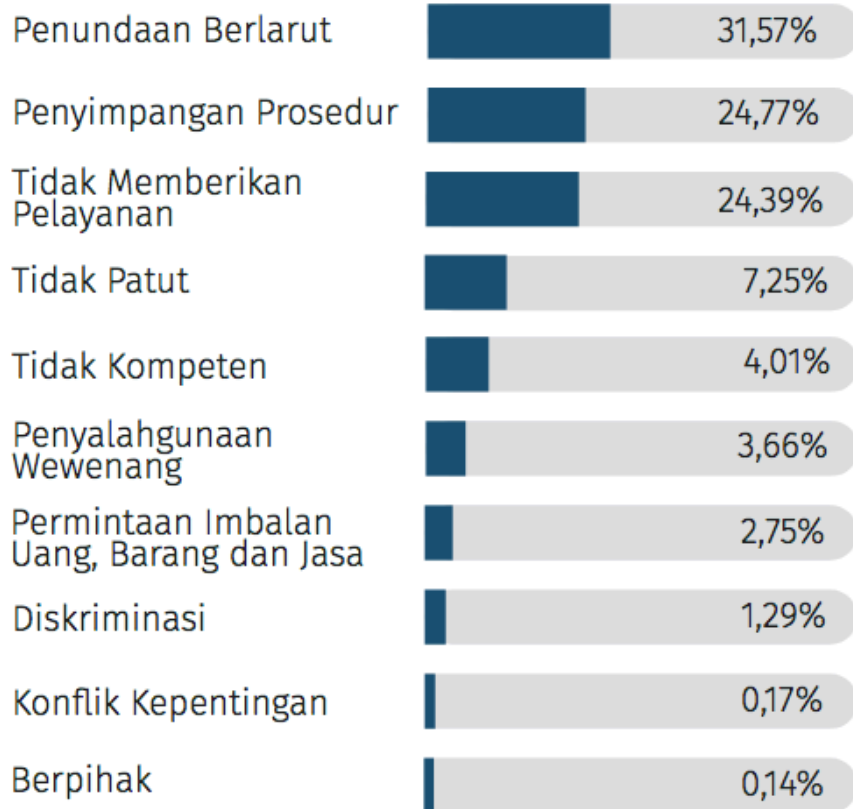


## Perilaku ASN Yang Diharapkan?

### **Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi (Transparency and Official Information Access)**

- ASN tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi;
- ASN tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Penyalahgunaan informasi resmi termasuk spekulasi saham berdasarkan informasi rahasia dan mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang tidak berwenang;
- ASN akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media dan masyarakat pada umumnya.

# Praktif Kecurangan dan Perilaku Korup



N: 7.204

Isu etika menjadi sangat vital dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai inti dari administrasi publik. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. Laporan Ombudsman Tahun 2020 terkait kasus dugaan maladministrasi mengilustrasikan hal tersebut.

## Faktor Terjadinya FRAUD

Pada umumnya fraud terjadi karena tiga hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud.  
Beberapa contoh pressure dapat timbul karena masalah keuangan pribadi. Sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan dan tenggat waktu dan target kerja yang tidak realistis.





## Faktor Terjadinya FRAUD

2. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Hal ini terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung fraud. Pada umumnya para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut.



## Faktor Terjadinya FRAUD

3. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Hal ini terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung fraud. Pada umumnya para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut.



## Perilaku ASN Yang Diharapkan?

**Perilaku berkaitan dengan menghindari perilaku yang curang dan koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour):**

- ASN tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi;
- ASN dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya;
- ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya;
- ASN akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup;
- ASN akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka;
- ASN akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik.

## Penggunaan Sumber Daya Milik Negara

Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi, sebagai contoh motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut biasanya sudah diatur secara resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yang dikeluarkan pemerintah/instansi. Setiap PNS harus memastikan bahwa:

- Penggunaannya diaturan sesuai dengan prosedur yang berlaku
- Penggunaannya dilakukan secara bertanggung- jawab dan efisien
- Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggungjawab.

## Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah

Mulgan (1997) mengidentifikasikan bahwa proses suatu organisasi akuntabel karena adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevant (relevan), reliable (dapat dipercaya), understandable (dapat dimengerti), serta comparable (dapat diperbandingkan), sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik.

## Perilaku ASN Yang Diharapkan?

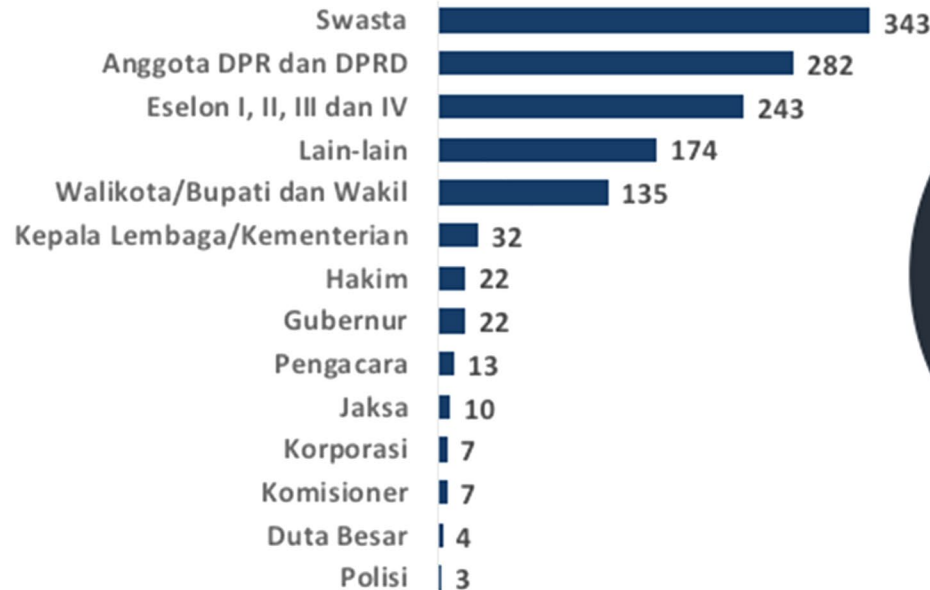
### **Perilaku berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information):**

- ASN bertindak dan mengambil keputusan secara transparan;
- ASN menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia;
- ASN mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan;
- ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas;
- ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- ASN memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- ASN tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

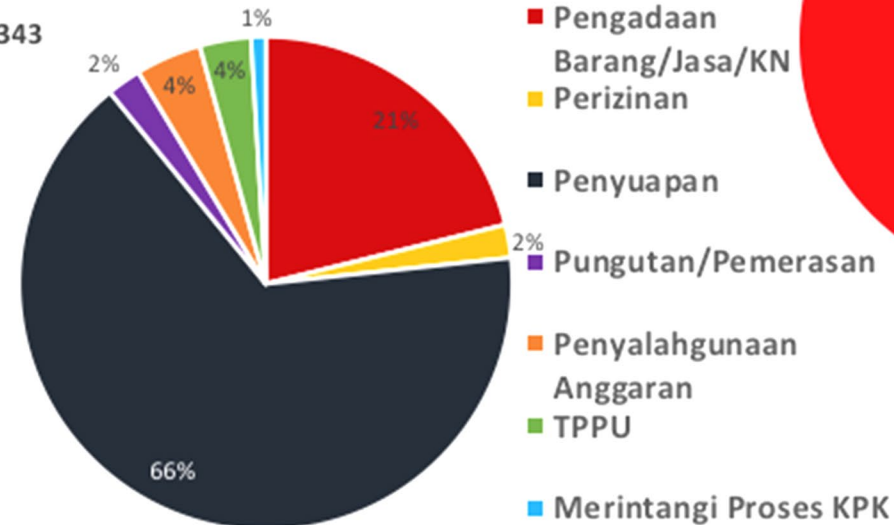
## Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi



Berdasarkan Profesi



Berdasarkan Jenis Perkara



**80%**  
SUAP-MENYUAP,  
GRATIFIKASI, dan  
PBJ

Sumber: Data Penindakan KPK Juni 2021





## 4. Akuntabel dalam Konteks Organisasi Pemerintah

### Membangun Budaya Antikorupsi di Organisasi Pemerintahan

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi Bulan Juni 2021, perkara Tindak Pidana Korupsi masih banyak dilakukan oleh unsur Swasta (343 kasus), Anggota DPR dan DPRD (282 kasus), Eselon I, II, III, dan IV (243 kasus), lain-lain (174 kasus), dan Walikota/Bupati dan Wakilnya (135 kasus). Dari keseluruhan kasus, 80% adalah kasus suap, gratifikasi, dan PBJ. Aulich (2011) mengatakan, terkait pemberantasan korupsi, peran negara dalam menciptakan sistem antikorupsi dapat dilakukan melalui peraturan perundangan, legislasi, dan perumusan kode etik ataupun panduan perilaku. Indonesia tidak kekurangan regulasi yang mengatur itu semua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2021, bahkan Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

## Membangun Budaya Antikorupsi di Organisasi Pemerintahan

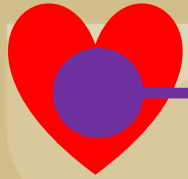
Bila Kita kembali ke pembahasan terkait ‘tanggung jawab’, dimensi yang melatar belakangi usaha memenuhi Tanggung Jawab Individu dan Institusi ada 2, yaitu: 1) dimensi aturan, sebagai panduan bagi setiap unsur pemerintahan hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan, dan 2) dimensi moral individu. Sebagai ASN, Anda tidak terlepas dari kedua dimensi tersebut. Oleh sebab itu, (Shafritz et al., 2011) menekankan bahwa fondasi paling utama dari unsur pegawai ataupun pejabat negara adalah integritas. Dengan integritas yang tinggi, dimensi aturan akan dapat dilihat dengan lurus dan jelas. Tanpa integritas, aturan hanya akan dipandang sebatas dokumen dan berpotensi dipersepsikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

## Membangun Budaya Antikorupsi di Organisasi Pemerintahan

Untuk membangun budaya antikorupsi di organisasi pemerintahan, dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan **Konflik Kepentingan**: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/infografis/tahap-tahap-dalam-penanganan-konflik-kepentingan>

1. Penyusunan Kerangka Kebijakan,
2. Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan,
3. Penyusunan Strategi Penangan Konflik Kepentingan, dan
4. Penyiapan Serangkaian Tindakan Untuk Menangani Konflik Kepentingan.

Penyusunan Kode Etik, Dukungan Lembaga, dan Sanksi bagi pelaku pelanggaran adalah beberapa hal yang sangat penting untuk dapat menjadi perhatian. Namun, memegang teguh prinsip moral, integritas, adalah kunci utama dari terlaksananya sistem yang disiapkan. Dari beberapa kasus yang dapat diakses pada *U4 Expert Answer* (diakses: 8 Oktober 2021), Akuntabilitas Pimpinan Lembaga juga menjadi hal penting untuk menjadi pegangan tindak dan perilaku pegawai di lingkungan lembaga atau institusi.



## AKUNTABEL + INTEGRITAS



Kondisi apa yang membuat berita itu berpotensi menjadi kasus Tindak Pidana Korupsi?

Jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan dengan berita itu?

Siapa saja pihak di dalam berita itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi?

Kondisi apa yang bisa menjadikan berita itu menjadi sebuah kasus Tindak Pidana Korupsi?

Apa dampak yang akan terjadi ke depannya bila berita tersebut menjadi sebuah kasus Tindak Pidana Korupsi?

Bila Anda harus memilih salah satu peran dalam berita itu, Apa yang akan Anda lakukan?





Accountability  
It starts with you!





**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# TERIMA KASIH